

**PENGARUH TEKANAN EKSTERNAL, KETIDAKPASTIAN LINGKUNGAN,
KOMITMEN MANAJEMEN, DAN AKSESIBILITAS LAPORAN
KEUANGAN TERHADAP PENERAPAN TRANSPARANSI
PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar)**

Oleh :

M. Ade Kasfauzi

Pembimbing : M. Rasuli dan Volta Diyanto

Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia

e-mail: muhammadadefasfauzi@gmail.com

*The Effect of External Pressure, Environment Uncertainty, Management Commitment,
and Accesibility of Financial Statements on Implementation of the Government
Financial Report Transparency
(Case Study on SKPDs Regency of Kampar)*

ABSTRACT

This research aims to analyze the influence of external pressure, environment uncertainty, management commitment, and accessibility of financial statements on implementation of transparency of financial report in Kampar regency. This research was carried out on financial management of each SKPD in Kampar regency. Samples obtained were amount to 104 person with purposive sampling manner. The data of this research using primary data directly through a questionnaire then and the data analysis user multiple linear regression by SPSS 20. The research indicates that: external pressure has significant effect on the implementation financial report transparency, where the significant value are $0,026 < 0,05$. Environmental uncertainly has not significant effect on transparency of financial reporting, where the significant value are $0,547 > 0,05$. Management commitment has significant effect on the implementation financial report transparency, where the significant value are $0,027 < 0,05$. Accessibility of financial statements has significant effect on the implementation financial report transparency, where the significant value are $0,025 < 0,05$.

Keyword: external pressure, environment uncertainty, management commitment, accessibility of financial statements, and transparency.

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi regional terutama pada tingkat Kabupaten/Kota telah menjadi isu menarik dan banyak dibahas serta didiskusikan oleh masyarakat dan para fakar pada saat ini. Ketertarikan

masyarakat atas perkembangan ekonomi regional tersebut dilatarbelakangi oleh diberlakukannya otonomi daerah (otda) yang telah dilaksanakan di Indonesia sejak tahun 2001.

Salah satu tujuan utama pelaksanaan otonomi daerah dan

desentralisasi adalah untuk menciptakan *good governance* yaitu pemerintahan yang baik yang ditandai dengan adanya transparansi dan akuntabilitas publik (Sukhemi, 2010). Untuk mewujudkan *good governance*, salah satunya yaitu dengan melakukan reformasi dalam laporan keuangan. Pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan yang relevan secara jujur dan terbuka kepada publik, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka menjalankan amanat rakyat itu sendiri (Aliyah, 2012).

Pengelolaan keuangan yang transparan menjadi tuntutan masyarakat guna tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam mekanisme tata kelola, pelaporan keuangan memiliki dua tujuan, yaitu organisasi yang transparan dan keterlibatan pemangku kepentingan (*stakeholders*) (Hess, 2007 dalam Arsyadi, 2012).

Transparansi merupakan suatu kebebasan untuk mengakses aktivitas politik dan ekonomi pemerintahan dan keputusan-keputusannya. Transparansi memungkinkan semua *stakeholders* dapat melihat struktur dan fungsi pemerintahan, tujuan dari kebijakan dan proyeksi fiskalnya, serta laporan pertanggung jawaban, baik oleh orang-orang maupun badan-badan yang dipilih, atas pilihan-pilihan dan tindakan-tindakannya.

Tidak adanya transparansi publik akan menimbulkan dampak negatif yang sangat luas dan dapat merugikan masyarakat. Dampak negatif yang akan timbul dikarenakan tidak adanya transparansi adalah dapat menimbulkan distorsi dalam alokasi sumberdaya, memunculkan ketidakadilan bagi masyarakat,

menyalurkan praktik-praktik korupsi, penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan (Arsyadi, 2012). Pada tahun 2014, tingkat korupsi di Indonesia masih terbilang sangat tinggi. Yaitu dengan nilai CPI (*corruption perceptions index*) sebesar 34 (kisaran 0-100) (transparency.org). dari nilai CPI tersebut dapat terlihat dan dapat digambarkan bahwa transparansi di Indonesia masih terbilang rendah.

Transparansi pada hakekatnya dapat memberikan dampak yang positif terhadap organisasi secara khusus dan daerah secara umum. Kebanyakan peraturan daerah tentang transparansi yang ada tidak memiliki sanksi, sehingga sulit dalam pelaksanaan dan penegakannya. Oleh karena itu, butuh komitmen yang tinggi oleh segenap jajaran pemerintah daerah untuk menerapkan transparansi pengelolaan keuangan (Arsyadi, 2012)..

Dalam pelaksanaan audit atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Kampar, Kabupaten Kampar mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Opini WDP yang diberikan oleh BPK tersebut diberikan untuk dampak sebagai berikut: (1) **Persediaan**. Pada saldo Persediaan per 31 Desember 2013 dan 2012 terdapat 43 SKPD yang tidak melakukan pencatatan mutasi barang dan *stock opname*. Belum adanya koordinasi antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan penyimpan barang mengenai penyerahan dokumen pendukung atas Belanja Barang yang diserahkan kepada masyarakat/ Pihak ketiga. Penyajian nilai persediaan pada Dinas Kesehatan belum mencakup persediaan di Puskesmas dan barang habis pakai. Penyajian nilai

persediaan pada RSUD Bangkinang tidak didukung dengan data yang valid; (2) **Investasi Jangka Panjang**. Investasi jangka panjang per 31 Desember 2013 diantaranya merupakan penyertaan modal pada PDAM tirta Kampar, PD Kampar Aneka Karya, Sebelas BMT dan sebelas koperasi. Penyertaan modal pada PDAM tirta Kampar dan PD. Aneka Kampar Aneka Karya tidak didukung dengan rincian dokumen yang lengkap dan memadai. Penyertaan modal pada delapan BMT dan delapan Koperasi tidak dapat ditelusuri keberadaan dan kelangsungan BMT dan Koperasi tersebut. Selain penyertaan modal, terdapat investasi jangka panjang non permanen lainnya berupa dana bergulir dalam bentuk hewan ternak yang belum disajikan dalam laporan keuangan; (3) **Aset Tetap**. Dari nilai aset tetap per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 terdapat Aset tetap hasil pengadaan s.d. Tahun 2007 yang belum dicatat dengan konsep harga perolehan; (4) **Aset Lainnya**. Dari nilai aset lainnya per 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2012 terdapat aset lain – lain yang tidak dapat ditelusuri dan dirinci per jenis.

Selain hal – hal tersebut diatas, pada Buku II BPK RI menemukan menyajikan permasalahan terkait kelemahan **Sistem Pengendalian Intern**, antara lain (1) Pengelolaan uang daerah pada BUD belum memiliki pengendalian yang memadai; (2) Nilai persediaan yang disajikan pada Neraca per 31 Desember 2013 belum menggambarkan seluruh Saldo Persediaan; (3) Pengelolaan Investasi Non Permanen dana Bergulir belum sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah; (4) Penatausahaan

Investasi Non Permanen dalam bentuk hewan ternak pada Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan tidak sesuai dengan pengelolaan keuangan daerah. (www.bpk.go.id).

Dari beberapa *point* Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI diatas dapat diketahui atau dapat digambarkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah masih belum seluruhnya memenuhi prinsip transparansi dan belum memenuhi kriteria keterandalan. Sebagaimana transparansi akan mendorong instansi untuk mengungkapkan informasi secara penuh tentang proses maupun praktiknya dalam laporan keuangan untuk memenuhi prasyarat kualitas keterandalan (*reliability*).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Arsyadi (2012) dengan menambahkan variabel aksesibilitas laporan keuangan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan transparansi. Faktor-faktor tersebut terdiri dari: Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan, Komitmen Manajemen, dan Aksesibilitas Laporan Keuangan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain: 1) Apakah tekanan eksternal berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan? 2) Apakah ketidakpastian lingkungan berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan? 3) Apakah komitmen manajemen berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan? 4) Apakah aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara tekanan eksternal terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. 2) Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara ketidakpastian lingkungan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. 3) Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara komitmen manajemen terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. 4) Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara aksesibilitas laporan keuangan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.

TELAAH PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS.

Pengaruh Tekanan Eksternal terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan

Kekuatan koersif adalah tekanan eksternal yang diberikan oleh pemerintah, peraturan, atau lembaga lain untuk mengadopsi struktur atau sistem (Ashworth, 2009 dalam Arsyadi, 2012). Di sisi lain, kekuatan koersif dari suatu peraturan dapat menyebabkan adanya kecenderungan organisasi untuk memperoleh atau memperbaiki legitimasi (*legitimate coercion*) (Scott, 2008 dalam Arsyadi, 2012), sehingga hanya menekankan aspek-aspek positif (Hess, 2007 dalam Arsyadi, 2012) agar organisasi terlihat baik oleh pihak-pihak di luar organisasi.

Perubahan organisasi yang didasari kekuatan koersif akan menyebabkan organisasi lebih mempertimbangkan pengaruh politik dari pada teknis (Ashworth, 2009 dalam Arsyadi, 2012). Perubahan organisasi yang lebih dipengaruhi

politik akan mengakibatkan praktik-praktik yang terjadi dalam organisasi, khususnya terkait penerapan transparansi pelaporan keuangan akan hanya bersifat formalitas yang ditujukan untuk memperoleh legitimasi.

Masalah transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah merupakan suatu masalah yang kompleks dan harus dibenahi mengingat lembaga yang dikelola oleh pemerintah merupakan institusi yang sangat kompleks dan sulit diawasi. Tingginya asimetris informasi yang terjadi di lingkungan pemerintah daerah telah mendorong berkurangnya transparansi didalam lingkungan pemerintah. Tidak transparannya didalam pengelolaan berbagai aspek didalam lingkungan organisasi mendorong munculnya tekanan eksternal yaitu untuk diterapkannya transparansi dalam hal pengelolaan keuangan pemerintah.

Hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh tekanan eksternal terhadap transparansi pelaporan keuangan yang dilakukan oleh Arsyadi (2012), menunjukkan bahwa tekanan eksternal merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penerapan transparansi pelaporan keuangan Pemda D.I.Y. Yogyakarta.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, diduga terdapat hubungan antara tekanan eksternal dengan penerapan transparansi pelaporan keuangan sehingga dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Terdapat pengaruh antara tekanan eksternal terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kampar.

Pengaruh Ketidakpastian Lingkungan Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan

Ketidakpastian lingkungan didefinisikan sebagai faktor-faktor lingkungan yang dihadapi oleh organisasi dan berpotensi mengganggu kinerja organisasi bila organisasi tidak mampu beradaptasi dengan baik terhadap laju perubahan maupun dinamikanya, yang terdiri dari faktor-faktor tingkat perubahan regulasi, tingkat perubahan teknologi informasi, tingkat perubahan pasar dan persaingan. Ketidakpastian merupakan persepsi dari anggota organisasi dalam mengantisipasi pengaruh faktor lingkungan terhadap organisasi (Priyono, 2001 dalam Sihalo, 2014).

Ketidakpastian lingkungan disebabkan oleh berbagai hal diluar organisasi seperti perubahan peraturan yang cepat dalam satu rentang waktu tertentu, adanya peraturan yang berbeda antara peraturan yang satu dengan yang lainnya, dan sebagainya. Ketidakpastian mengakibatkan organisasi merubah proses dan strukturnya (Govinarajan, 1984 dalam Arsyadi, 2012). Perubahan organisasi baik proses maupun struktur yang ada pada organisasi sebagai respon terhadap ketidakpastian lingkungan tidaklah mudah. Ketidaksiapan organisasi terhadap suatu standar berupa peraturan akan mengakibatkan rendahnya pemahaman organisasi dalam bertransformasi keperaturan yang baru. Dalam situasi yang tidak pasti pemimpin organisasi akan memutuskan bahwa respon terbaik yang dapat dilakukan organisasi adalah dengan meniru organisasi yang mereka anggap berhasil (Mizruchi dan Fein, 1999 dalam Arsyadi, 2012).

Transparansi pelaporan keuangan mengharuskan instansi untuk menyajikan laporan keuangan yang bebas dari salah material dan informasi yang bias kepada pihak luar. Hal tersebut sesuai dengan konsep keterandalan (*reliability*) dimana informasi dalam laporan keuangan harus bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi (PP No. 71 Tahun 2010, Lampiran II: Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan No.35). Keterandalan dipengaruhi oleh ketidakpastian item-item yang diakui dan diukur dalam laporan keuangan (Intakhan dan Ussahawanitchakait, 2009). Walaupun demikian, organisasi akan menyajikan struktur formal dari akun yang bisa diterima. Atas setiap kegiatan organisasi guna memenuhi harapan masyarakat. Oleh karena itu, transparansi akan mendorong instansi untuk mengungkapkan informasi secara penuh tentang proses maupun praktiknya dalam laporan keuangan untuk memenuhi prasyarat kualitas keterandalan (*reliability*).

Hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh ketidakpastian lingkungan terhadap transparansi pelaporan keuangan yang dilakukan oleh Arsyadi (2012) menunjukkan bahwa ketidakpastian lingkungan tidak berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, diduga terdapat hubungan antara ketidakpastian lingkungan dengan penerapan transparansi pelaporan keuangan sehingga dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Terdapat pengaruh antara ketidakpastian lingkungan terhadap

penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kampar.

Pengaruh Komitmen Manajemen terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan

Menurut Sapeni dalam Silvia (2013), komitmen dapat diartikan kecenderungan dalam diri seseorang untuk merasa aktif dalam suatu kegiatan, harus sanggup menetapkan keputusan untuk dirinya sendiri dan melaksanakan kegiatannya tersebut dengan kesungguhan hati dan rasa tanggungjawab.

Paine (1994) dalam Arsyadi (2012) menyatakan bahwa strategi integritas merupakan sesuatu yang lebih luas, lebih dalam, dan lebih menuntut dari pada inisiatif kepatuhan atas hukum. Komitmen manajemen dapat dikaitkan dengan integritas manajemen dalam penerapan transparansi pelaporan keuangan. Integritas dan kepatuhan atas hukum dan peraturan akan terwujud bila diikuti dengan komitmen manajemen yang kuat didalam organisasi. Dengan komitmen yang kuat, transparansi akan dapat terwujud khususnya dalam pelaporan keuangan.

Hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh komitmen manajemen terhadap transparansi pelaporan keuangan yang dilakukan oleh Arsyadi (2012) menunjukkan bahwa komitmen manajemen berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi D. I. Yogyakarta. Adanya peraturan dan perundang-undangan merupakan faktor pendorong diterapkannya transparansi pelaporan keuangan akan

tetapi dibutuhkan komitmen dari manajemen dalam mengimplementasikannya. Semakin kuat komitmen dari manajemen dalam melaksanakan penerapan aturan dan prosedur dalam organisasi maka akan ikut mendorong diterapkannya transparansi pelaporan keuangan.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, diduga terdapat hubungan antara ketidakpastian lingkungan dengan penerapan transparansi pelaporan keuangan sehingga dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Terdapat pengaruh antara komitmen manajemen terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kampar.

Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan

Aksesibilitas menurut persepektif tata ruang adalah keadaan atau ketersediaan hubungan dari suatu tempat ke tempat lainnya atau kemudahan seseorang atau kendaraan untuk bergerak dari suatu tempat ketempat lain dengan aman, nyaman, serta kecepatan yang wajar (Rohman, 2009). Aksesibilitas dalam laporan keuangan adalah sebagai kemudahan seseorang untuk memperoleh informasi laporan keuangan (Mulyana, 2006).

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Artinya, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan (Mardiasmo, 2000). Transparansi mengisyaratkan bahwa laporan tahunan tidak hanya dibuat tetapi juga

terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat, karena aktivitas pemerintah adalah dalam rangka menjalankan amanat rakyat.

Sagala (2011) menyatakan pengungkapan informasi yang lengkap dalam laporan keuangan akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan apabila pemerintah memberikan akses yang mudah bagi masyarakat untuk mengetahui, mendapatkan dan menilai laporan keuangan tersebut maka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah akan semakin meningkat.

Aksesibilitas merupakan proses pengungkapan laporan keuangan untuk dapat dikonsumsi oleh publik, aksesibilitas laporan keuangan yang baik akan mewujudkan hubungan yang baik pula antara publik dan pemerintah. Suatu proses inilah yang merupakan suatu media untuk terciptanya transparansi dan akuntabilitas (Iqbal, 2012).

Aksesibilitas laporan keuangan merupakan salah satu syarat terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah maupun SKPD. Semakin tinggi aksesibilitas atas laporan keuangan suatu pemerintah daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maka semakin tinggi pula terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di daerah (Purnama, 2014).

Hasil penelitian Aliyah (2012) menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Jepara.

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, diduga terdapat

hubungan antara aksesibilitas laporan keuangan dengan penerapan transparansi pelaporan keuangan sehingga dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

H₄: Terdapat pengaruh antara aksesibilitas laporan keuangan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kampar.

METODOLOGI PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemerintah daerah (pemda) di wilayah Pemerintah Kabupaten Kampar. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive sampling* yaitu sampel yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan peneliti (Sekaran, 2003). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari sumber pertamanya. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan cara membagikan kuesioner kepada pegawai pejabat eselon 3 dan 4 yaitu: Sekretaris, Kasubag Keuangan dan Kasubag Program yang bekerja minimal 1 tahun pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar.

Metode analisis data digunakan analisis regresi linear berganda dengan rumus sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Keterangan :

Y = Transparansi Pelaporan keuangan

- a = Konstansta
 b_1, b_2 = Koefisien Regresi
 X_1 = Tekanan Eksternal
 X_2 = Ketidakpastian Lingkungan
 X_3 = Komitmen Manajemen
 X_4 = Aksesibilitas Laporan Keuangan
 e = Standar Error

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.

Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel yang terdiri dari variabel dependen yaitu Transparansi Pelaporan Keuangan (Y). Variabel independen yaitu Tekanan Eksternal (X1) Ketidakpastian Lingkungan (X2) Komitmen Manajemen (X3) dan Aksesibilitas Laporan Keuangan (X4).

Transparansi pelaporan keuangan (Y)

Transparansi pelaporan keuangan adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai (Sukhemi, 2011). Silver (2005) dalam Arsyadi (2012) mengatakan bahwa para pemangku kepentingan (*stakeholders*) menuntut bahwa organisasi untuk menjadi lebih transparan dalam praktiknya, tidak hanya pada jumlah yang dirilis, tapi juga bagaimana organisasi menjalankan operasionalnya.

Variabel transparansi pelaporan keuangan diukur dengan menggunakan 5 (lima) item pertanyaan dengan menggunakan skala likert 5 point yang diadopsi dari penelitian yang dilakukan oleh Arsyadi (2012).

Tekanan Eksternal (X1)

Tekanan eksternal dalam hal ini terkait dengan tekanan yang berasal dari luar SKPD seperti peraturan (regulasi), eksekutif, masyarakat, dan sebagainya. (Frumkin dan Galaskiewicz, dalam Arsyadi, 2004) menyatakan bahwa tekanan eksternal dapat mempengaruhi tingkat kemampuan pemerintah menjadi rendah, terutama terkait dengan penerapan suatu kebijakan maupun prosedur. Adanya tekanan eksternal dapat berakibat pada praktik-praktik SKPD yang hanya bersifat formalitas untuk memperoleh legitimasi. Praktik-praktik yang dimaksud dalam penelitian ini dikhususkan pada penerapan transparansi pelaporan keuangan.

Variabel tekanan eksternal diukur dengan menggunakan 6 (enam) item pertanyaan dengan menggunakan skala likert 5 point yang diadopsi dari penelitian yang dilakukan oleh Arsyadi (2012).

Ketidakpastian Lingkungan (X2)

Ketidakpastian lingkungan dalam hal ini adalah kondisi dimana SKPD mengalami ketidakpastian yang dapat disebabkan adanya pengaruh dari luar SKPD, seperti sering terjadinya peraturan, tidak *match*-nya antara peraturan yang satu dengan yang lain, terjadi mutasi staf SKPD yang cepat perubahan teknologi, dan lain sebagainya. SKPD dituntut untuk menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada, baik dalam praktik maupun operasionalnya. Praktik yang dimaksud dalam penelitian ini dikhususkan pada penerapan transparansi pelaporan keuangan.

Variabel ketidakpastian lingkungan diukur dengan

menggunakan 4 (empat) item pertanyaan dengan menggunakan skala likert 5 point yang diadopsi dari penelitian yang dilakukan oleh Arsyadi (2012).

Komitmen Manajemen (X3)

Komitmen manajemen dalam hal ini terkait dengan integritas manajemen dalam menerapkan transparansi pelaporan keuangan. Paine (1994) dalam Arsyadi (2012) menyatakan bahwa strategi integritas merupakan sesuatu yang lebih luas, lebih dalam, dan lebih menuntun daripada sekedar inisiatif kepatuhan atas hukum maupun peraturan. Integritas dan kepatuhan atas hukum dan peraturan akan terwujud bila diikuti oleh komitmen manajemen yang kuat. Manajemen seharusnya mengembangkan nilai-nilai yang dibutuhkan untuk sukses dalam jangka panjang. Nilai-nilai tersebut diimplementasikan melalui tindakan dan perilaku yang tepat. Selain itu, manajemen secara pribadi juga terlibat untuk memastikan bahwa sistem manajemen SKPD yang dikembangkan dan diimplementasikan sudah berjalan dengan baik. Sistem manajemen yang baik, dalam hal ini transparansi pelaporan keuangan dapat tercapai apabila SKPD memiliki staf yang andal dan kompeten dibidangnya, dibangunnya budaya etis secara komprehensif, dan lain-lain. Sistem manajemen yang baik tersebut akan berdampak pada terpenuhinya standar profesionalisme yang seharusnya ada pada SKPD-SKPD.

Variabel komitmen manajemen diukur dengan menggunakan 5 (lima) item pertanyaan dengan menggunakan

skala likert 5 point yang diadopsi dari penelitian yang dilakukan oleh Arsyadi (2012).

Aksesibilitas Laporan Keuangan (X4)

Aliyah (2012) menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan adalah kemampuan untuk memberikan akses bagi *stakeholder* untuk mengetahui atau memperoleh laporan keuangan sebagai bagian dari partisipasi *stakeholder*. Aksesibilitas Laporan Keuangan adalah hal yang dapat dijadikan akses atau hal yang memudahkan untuk memperoleh informasi laporan keuangan. Aksesibilitas dalam laporan keuangan sebagai kemudahan seseorang untuk memperoleh informasi laporan keuangan (Mulyana, 2006).

Variabel aksesibilitas laporan keuangan diukur dengan menggunakan 3 (tiga) item pertanyaan dengan menggunakan skala likert 5 point yang diadopsi dari penelitian yang dilakukan oleh Iqbal (2009).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kuesioner dan Demografi

Jumlah kuesioner yang disebar sebanyak 102 kuesioner dan jumlah kuesioner yang kembali berjumlah 88 kuesioner atau (86,27%), tingginya tingkat pengembalian (*respon rate*) tersebut, dikarenakan kuesioner dibagikan secara langsung kepada responden. Jumlah kuesioner yang dapat diolah sebanyak 85 kuesioner atau (83,33%), jumlah kuesioner yang tidak dapat diolah sebanyak 3 kuesioner atau (2,94%) sedangkan kuesioner yang tidak kembali atau

tidak mendapat respon sebanyak 14 kuesioner atau (13,73%).

Pengujian Kualitas Data Hasil uji Validitas data

Uji validitas data digunakan untuk mengukur sah atau tidak suatu kuesioner. Di mana keseluruhan variabel penelitian terdiri dari 23 pernyataan yang harus dijawab oleh responden. Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk *degree of freedom* ($df = n - 2$) dengan α 0,05, n adalah jumlah sampel (Ghozali, 2013:53). Dalam penelitian ini $df = n-2$ ($85-2$) = 83, sehingga didapat r tabel untuk df (83) = 0,213.

Hasil Uji Reliabilitas Data

Batasan untuk uji reliabilitas adalah 0,6. Jika nilai α lebih besar dari 0,6 maka data yang digunakan dalam penelitian ini reliabel.

Tabel 1
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Jumlah Item	Cronbach Alpha	Keterangan
Transparansi Pelaporan Keuangan	5	0,727	Reliabel
Tekanan Eksternal	6	0,821	Reliabel
Ketidakpastian Lingkungan	4	0,774	Reliabel
Komitmen Manajemen	5	0,881	Reliabel
Aksesibilitas Laporan Keuangan	3	0,886	Reliabel

Sumber: Data Olahan, 2015

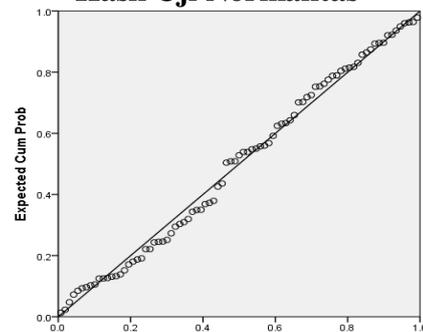
Hasil Analisis Data

Hasil Uji Normalitas Data

Untuk melihat normalitas data dapat dilihat dari *normal probability plot*. Jika menyebar disekitar garis diagonal (tidak terpecah jauh dari garis lurus), maka dapat disimpulkan bahwa persyaratan normalitas data

adalah terpenuhi dan model regresi yang digunakan memenuhi asumsi normalitas data. Dan berdasarkan gambar 1 berikut diketahui bahwa data memenuhi asumsi normalitas.

Gambar 1
Hasil Uji Normalitas



Sumber: Data Olahan, 2015

Hasil Uji Multikolinearitas

Deteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *Varian Inflation Factor (VIF)* dan *Tolerance*. Jika nilai $VIF > 10$ atau nilai $Tolerance < 0,10$ berarti terdapat multikolinearitas.

Tabel 2
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tol.	VIF	Keterangan
Tekanan Eksternal	0,593	1,685	Bebas Multikolinearitas
Ketidakpastian Lingkungan	0,579	1,727	Bebas Multikolinearitas
Komitmen Manajemen	0,511	1,959	Bebas Multikolinearitas
Aksesibilitas Laporan Keuangan	0,543	1,842	Bebas Multikolinearitas

Sumber: Data Olahan, 2015

Hasil Uji Autokorelasi

Autokorelasi pada penelitian ini dideteksi dengan nilai *Durbin-Watson*. Batas tidak terjadinya autokorelasi adalah angka *Durbin-Watson*

Watson berada antara -2 sampai dengan +2.

Tabel 3
Hasil Uji Autokorelasi

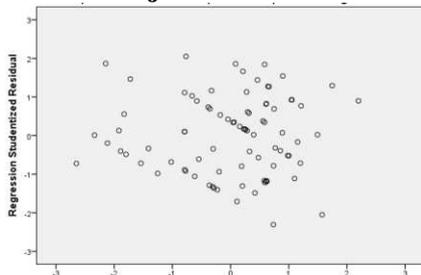
Model	Durbin - Watson	dL	dU	Ket
1	1.854	-2	+2	Bebas Autokorelasi

Sumber: Data Olahan, 2015

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Pemeriksaan terhadap gejala heteroskedastisitas adalah dengan melihat pola pencar (*scatter plot*). Jika diagram pencar yang ada tidak membentuk pola atau acak, maka regresi pada penelitian ini tidak mengalami gangguan heteroskedastisitas. Dan berdasarkan gambar 2 berikut di ketahui bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas dalam model regresi.

Gambar 2
Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Data Olahan, 2015

Hasil Pengujian Model Regresi

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis regresi berganda terhadap model penelitian yang diajukan dilakukan dengan bantuan *software* SPSS

(*Statistical Product and Service Solutions*) versi 20.

Tabel 4
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstand. Coefficients		Stand. Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	8.779	1.510		5.813	.000
Tekanan Eksternal	.165	.073	.244	2.273	.026
Ketidakpastian Lingkungan	.074	.122	.066	.605	.547
Komitmen Manajemen	.179	.080	.261	2.249	.027
Aksesibilitas Laporan Keuangan	.237	.104	.256	2.281	.025

Sumber: Data Olahan, 2015

Berdasarkan Tabel 4 diatas, maka persamaan regresi berganda dari model penelitian menjadi sebagai berikut :

$$Y = 8,779 + 0,165X_1 + 0,074X_2 + 0,179X_3 + 0,237X_4 + e$$

Hasil Pengujian Hipotesis Satu (Tekanan Eksternal)

Dari Tabel 4 di atas dapat dilihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,273 > 1,990$ dan $sig.t (0,026) < 0,05$ dengan demikian H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dari hasil pengujian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tekanan eksternal berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil pengujian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Arsyadi (2012) menunjukkan bahwa tekanan eksternal berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Tekanan eksternal seperti

peraturan, eksekutif dan masyarakat menjadi pendorong terjadinya penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kampar. Dengan adanya undang-undang atau peraturan, eksekutif dan masyarakat SKPD diharapkan mampu menerapkan transparansi pelaporan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hasil Pengujian Hipotesis Dua (Ketidakpastian Lingkungan)

Dari Tabel 4 di atas dapat dilihat bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $0,607 < 1,990$ dan $sig.t (0,547) > 0,05$ dengan demikian H_0 diterima dan H_2 ditolak. Dari hasil pengujian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa ketidakpastian lingkungan tidak berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil ini didukung oleh peneliti sebelumnya Arsyadi (2012) menunjukkan bahwa ketidakpastian lingkungan tidak memiliki pengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Ketidakpastian lingkungan adalah kondisi dimana SKPD mengalami ketidakpastian yang dapat disebabkan adanya pengaruh dari luar SKPD, seperti sering terjadinya peraturan, tidak *match*-nya antara peraturan yang satu dengan yang lain, terjadi mutasi staf SKPD yang cepat, dan lain sebagainya. Pada kenyataannya ketidakpastian lingkungan terjadi dan dialami oleh SKPD. Akan tetapi, dalam praktiknya kendala-kendala yang dihadapi SKPD tidak menyebabkan SKPD cenderung untuk meniru SKPD lain dan lebih memilih

menyiasati kendala-kendala serta perubahan-perubahan yang terjadi dengan cara SKPD itu sendiri atau lebih memilih menyesuaikan keadaan dengan lingkungan di SKPD itu berada.

Hasil Pengujian Hipotesis Tiga (Komitmen Manajemen)

Dari Tabel 4 di atas dapat dilihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,249 > 1,990$ dan $sig.t (0,027) < 0,05$ dengan demikian H_0 ditolak dan H_3 diterima. Dari hasil pengujian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa komitmen manajemen berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan Arsyadi (2012) menunjukkan bahwa komitmen manajemen berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Komitmen manajemen yaitu suatu hal yang terkait dengan integritas manajemen dalam menerapkan transparansi pelaporan keuangan. Integritas dan kepatuhan atas hukum dan peraturan akan terwujud bila diikuti oleh komitmen manajemen yang kuat.

Hasil Pengujian Hipotesis Empat (Aksesibilitas Laporan Keuangan)

Dari Tabel 4 di atas dapat dilihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,281 > 1,990$ dan $sig.t (0,025) < 0,05$ dengan demikian H_0 ditolak dan H_4 diterima. Dari hasil pengujian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Dari hasil hipotesis diatas dapat diketahui bahwa dengan menyediakan dan memberikan kemudahan dan akses laporan keuangan kepada pengguna informasi keuangan ternyata dapat meningkatkan penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil pengujian hipotesis ini didukung oleh penelitian Aliyah (2012) dan Sagala (2011) yang menyatakan penerapan transparansi pelaporan keuangan dipengaruhi oleh aksesibilitas laporan keuangan.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa besar kemampuan variabel-variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependennya. Berikut hasil uji koefisien determinasi dalam penelitian ini :

Tabel 5
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.672 ^a	.452	.424	2.05711

Sumber: Data Olahan, 2015

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh *adjusted R²* sebesar 0,424. Dengan demikian variabel tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan, komitmen manajemen, dan aksesibilitas laporan keuangan hanya dapat menjelaskan variabel penerapan transparansi pelaporan keuangan sebesar 42%. Sedangkan sisanya 58% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak teramati dalam model penelitian ini.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan, komitmen manajemen, dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu:

- 1) Hasil pengujian hipotesis pertama membuktikan bahwa variabel tekanan eksternal berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kampar. Tekanan eksternal seperti peraturan, eksekutif dan masyarakat menjadi pendorong terjadinya penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kampar. Dengan adanya undang-undang atau peraturan, eksekutif dan masyarakat SKPD diharapkan mampu menerapkan transparansi pelaporan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 2) Hasil pengujian hipotesis kedua membuktikan bahwa variabel ketidakpastian lingkungan tidak berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kampar. Pada kenyataannya ketidakpastian lingkungan terjadi dan dialami oleh SKPD. Akan tetapi, dalam praktiknya kendala-kendala yang dihadapi SKPD tidak menyebabkan SKPD cenderung untuk meniru SKPD lain dan lebih memilih menyalasi kendala-kendala serta perubahan-perubahan yang terjadi dengan cara SKPD itu sendiri atau menyesuaikan keadaan dengan lingkungan dimana SKPD itu berada.
- 3) Hasil pengujian hipotesis ketiga membuktikan bahwa variabel

komitmen manajemen berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kampar. Komitmen manajemen yaitu suatu hal yang terkait dengan integritas manajemen dalam menerapkan transparansi pelaporan keuangan. Integritas dan kepatuhan atas hukum dan peraturan akan terwujud bila diikuti oleh komitmen manajemen yang kuat.

- 4) Hasil pengujian hipotesis ketiga membuktikan bahwa variabel komitmen manajemen berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kampar. Apabila diberikan akses atau kemudahan dalam memperoleh informasi tentang pelaporan keuangan maka akan mendorong meningkatkan penerapan transparansi pelaporan keuangan.

Saran

Saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti bagi kesempurnaan penelitian selanjutnya yaitu:

1. Penelitian ini hanya menggunakan 4 (empat) variabel independen, yaitu tekanan eksternal, ketidakpastian lingkungan, komitmen manajemen dan aksesibilitas laporan keuangan. Oleh karena itu diharapkan penelitian selanjutnya yang ingin meneliti dengan topik yang sama agar dapat menambahkan variabel lain yang mungkin dapat mempengaruhi penerapan transparansi pelaporan keuangan seperti tingkat pengungkapan laporan keuangan, kompetensi sumberdaya manusia, dan lain-lain.

2. Penelitian berikutnya dapat memperluas objek penelitian, misalnya mengambil sampel pada SKPD yang ada di kota/kabupaten lainnya bahkan se-Provinsi Riau. Sehingga hasil yang diperoleh lebih maksimal dan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang transparansi pelaporan keuangan.
- 3) penelitian selanjutnya diharapkan tidak hanya menggunakan metode angket (kuesioner) tetapi juga dapat menambahkan metode lain seperti metode wawancara dalam memperoleh data agar hasilnya dapat menunjukkan keadaan yang sebenarnya
- 4) Penelitian selanjutnya diharapkan dengan dapat mendampingi responden secara langsung pada saat pengisian kuesioner. Sehingga responden dapat menanyakan secara langsung kepada peneliti terhadap pertanyaan-pertanyaan yang kurang dimengerti responden. Sehingga data yang dihasilkan sesuai dengan maksud setiap pertanyaan yang diajukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliyah, Siti dan Aida Nahar. 2012. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara. *Jurnal Akuntansi & Auditing*, Volume 8/No. 2/Mei 2012: 97-189.
- Mardiasmo. 2002. Otonomi Daerah sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah. *Jurnal Ekonomi Rakyat*. Tersedia di

- Mulyana, Budi. 2006. *Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*, Jurnal Akuntansi Pemerintah, Vol. 2 No. 1. Mei 2006:65-78.
- Nasution, Saufi Iqbal. 2009. *Pengaruh Penyajian Neraca SKPD dan Aksesibilitas Laporan Keuangan SKPD Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan SKPD di Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara*. Skripsi. USU.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Ridha, M Arsyadi dan Hardo Basuki. 2012. *Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan, dan Komitmen Manajemen terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan keuangan*. *Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin*, 2012.
- Rohman, Abdul, 2009, *Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Fungsi Pengawasan dan Kinerja Pemerintah Daerah*. Jurnal Akuntansi dan Bisnis
- Sagala, Marjuki. 2011. *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah*. Skripsi. Universitas Sumatera Utara.
- Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Edisi4. Salemba empat. Jakarta.
- Sihaloho, Johaness Et Al . 2014. *Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan, dan Komitmen Manajemen terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan*. Jurnal Online Mahasiswa. Universitas Riau.
- Silvia. 2013. *Pengaruh Keterbatasan Sistem Informasi, Komitmen Manajemen, dan Otoritas Pengambilan Keputusan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Skripsi. Universitas Negeri Padang.
- Sukhemi. 2011. *Pengaruh Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan terhadap Transparansi Pelaporan Keuangan Daerah (Di Provinsi D.I.Yogyakarta)*. Akmenika Jurnal Akuntansi dan Manajemen, Volume 8, 2011.
- www.bpk.go.id
- www.google.com
- www.transparency.org